

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Semakin tahun tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 258.000.000 jiwa dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 264.000.000 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia menyebar keseluruh wilayah wilayah di Indonesia termasuk kota-kota Metropolitan yang menjadi sasaran masyarakat untuk mencari mata pencaharian. Kota-kota Metropolitan tersebut adalah Jakarta, Bandung, Medan, dan masih banyak lagi dimana salah satunya adalah Kota Semarang.

Salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat ialah wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang. Data menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang jumlah penduduk mencapai 1,658,552 per Desember 2017. Tingginya jumlah penduduk di perkotaan dikarenakan banyaknya masyarakat melakukan urbanisasi yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi karena masyarakat pedesaan berpikiran bahwa kehidupan dan pekerjaan di perkotaan lebih dari desa. Sebab itu, masyarakat setiap tahunnya melakukan urbanisasi.

Jumlah penduduk yang tinggi menjadikan wilayah kota semakin padat dan sempit yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan perkotaan dan rumah tinggal. Salah satu dampak dari tingginya jumlah penduduk ialah terciptanya perumahan dan

pemukiman kumuh. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, sedangkan pengertian perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Berbeda dengan perumahan kumuh, pengertian permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tempat tinggal yang tidak layak huni sangat tidak baik bagi kesehatan dan perkembangan kota. Dimana hal ini menjadikan wilayah atau daerah tersebut menjadi kumuh dan kotor. Selain tingginya jumlah penduduk, hal yang lain yang menjadi faktor pendukung terciptanya permukiman kumuh adalah kedekatan jarak wilayah dengan pusat kota, kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, pola perilaku masyarakat yang belum sadar akan lingkungan, kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana serta adanya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dari adanya permukiman kumuh tersebut. Permukiman yang kumuh dan kotor dari tahun ke tahun semakin bertambah dan menjadi sebuah masalah yang harus ditangani oleh pemerintah. Hal ini dapat ditemukan di wilayah Kecamatan Semarang Tengah khususnya Kelurahan Miroto yang masih memiliki tingkat kekumuhan yang paling tinggi dan merupakan kelurahan yang berada ditengah-tengah kota.

Tabel 1.1
Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Kota Semarang

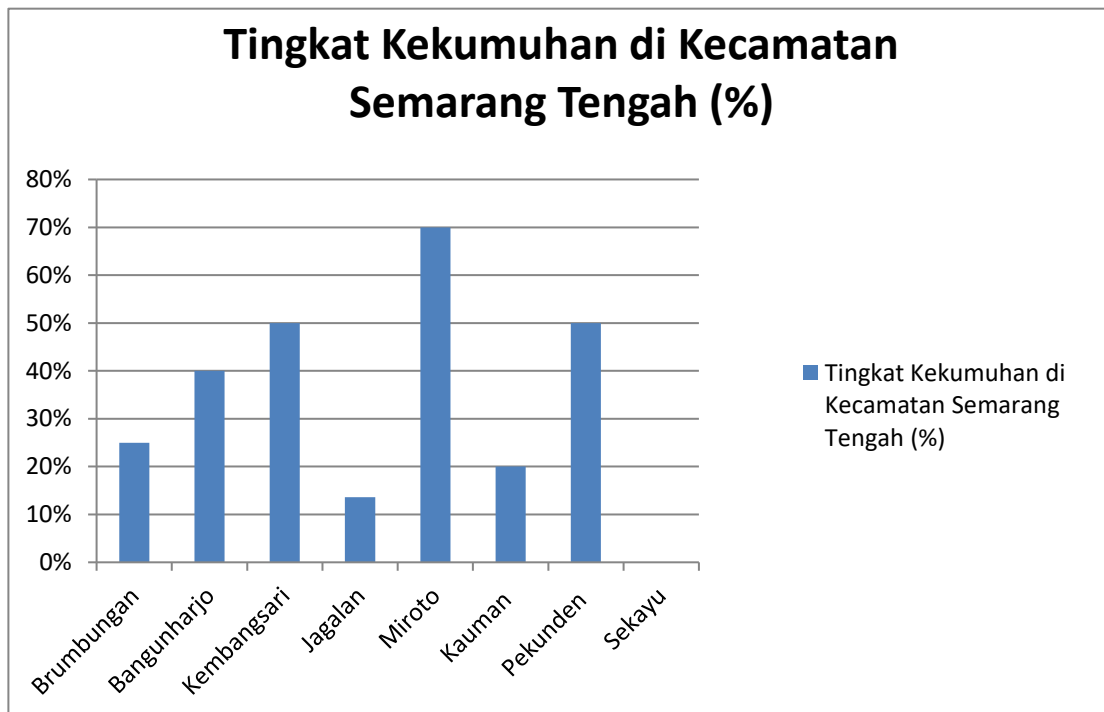
No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
1.	Tugu	Mangunharjo	1,56
		Mangkang Kulon	3,79
		Mangkang Wetan	13,59
2.	Genuk	Genuk Sari	6,19
		Banjardowo	3,38
		Terboyo Kulon	0,62
		Trimulyo	6,00
3.	Semarang Barat	Tambakharjo	2,67
		Ngemplak Simongan	1,32
		Krobokan	16,16
4.	Semarang Tengah	Brumbungan	2,68
		Bangunharjo	4,00
		Kembangsari	5,00
		Jagalan	1,36
		Miroto	7,00
		Kauman	2,00
		Pekunden	5,00
		Sekayu	2,32
5.	Semarang Timur	Bugangan	8,34
		Rejosari	1,30
		Mlatiharjo	11,52
		Mlatibaru	3,93
		Rejomulyo	8,43
		Kemijen	15,86
6.	Semarang Utara	Tanjung Mas	37,63
		Bandarharjo	33,44
		Panggung Kidul	26,00
		Kuningan	23,09
		Dadapsari	27,24
7.	Candisari	Jomblang	1,10
		Karanganyar Gunung	1,67
8.	Pedurungan	Gemah	5,50
		Muktiharjo Kidul	13,76
		Penggaron Kidul	2,19
9.	Semarang Selatan	Lamper Lor	4,71
		Lamper Kidul	1,53
		Peterongan	1,33
		Lamper Tengah	7,39

10.	Tembalang	Tandang Sendangguwo Rowosari Meteseh	3,12 4,36 7,07 10,42
11.	Gayamsari	Sawah Besar Kaligawe Tambakrejo Gayamsari	6,14 7,35 5,23 1,75
12.	Mijen	Purwosari Jatibarang	3,45 0,86
13.	Banyumanik	Ngesrep Padangsari Jabungan Tinjomoyo Srandol Kulon Gedawang	0,59 0,49 11,68 5,58 3,67 5,54
14.	Gunung Pati	Patemon Sekaran Sadeng Sukorejo Nongkosawit	0,14 3,19 2,47 2,60 3,77
15.	Ngaliyan	Wonosari Kalipancur Purwoyoso	3,12 1,32 1,65
T O T A L			415,83

Sumber SK Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah No. 050/801/2014

Menurut SK Walikota Provinsi Jawa Tengah No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang, salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai lingkungan kumuh yakni, Kelurahan Miroto yang berada di Semarang Tengah. Kelurahan Miroto salah satu kelurahan di Semarang Tengah yang memiliki tingkat kekumuhan sebesar 7,00 hektare dan menjadi kelurahan yang memiliki tingkat kekumuhan tertinggi di wilayah tersebut.

Tingginya tingkat kekumuhan di Kelurahan Miroto patut diteliti karena jika dilihat dari letaknya sangat strategis dan berada di pusat kota. Kelurahan Miroto memiliki luas wilayah sebesar 0,37 km atau 34.599 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 5.312 jiwa . Kelurahan Miroto terbagi atas 5 RW dengan 42 RT, dimana dari 5 RW yang ada di Kelurahan Miroto 3 diantara masuk kedalam kategori kumuh yakni terdapat di RW 1, 2, dan 4.



Jika dilihat dari data yang sudah disajikan, dapat dilihat bahwa Kecamatan Semarang Tengah masih memiliki kelurahan yang tergolong kedalam pemukiman kumuh. Salah satu kelurahan yang memiliki tingkat kekumuhan yang paling tinggi

adalah Kelurahan Miroto. Dapat dilihat dari hasil persentase yang ada bahwa Kelurahan Miroto memiliki tingkat kekumuhan sebesar 70%.

Tabel 1.2
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2017

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk
1.	Pekunden	0,8	4.079	5,099
2.	Karang Kidul	0,83	4.888	5,889
3.	Jagalan	0,27	6.235	23,093
4.	Brumbungan	0,31	3.430	11,065
5.	Miroto	0,35	5.245	14,986
6.	Gabahan	0,2	6.363	31,815
7.	Kranggan	0,25	5.579	22,316
8.	Purwodinatan	0,49	4.663	9,516
9.	Kauman	0,29	3.768	12,993
10.	Bangunharjo	0,25	3.212	12,848
11.	Kembang Sari	0,3	3.914	13,047
12.	Pandan Sari	0,47	3.241	6,896
13.	Sekayu	0,57	3.847	6,749
14.	Pindrikan Kidul	0,3	3.945	13,150
15.	Pindrikan Lor	0,37	7.302	19,735

Sumber Data Monografi Kelurahan

Banyaknya jumlah penduduk dengan besarnya luas wilayah yang tidak sebanding menjadikan sebuah wilayah dikatakan kumuh. Dimana dari data diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah Kelurahan Miroto sebesar 0,35 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.245 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 14.986. Suatu wilayah dapat dikatakan kumuh apabila memenuhi beberapa kriteria menurut UU No. 1 Tahun 2011, yakni :

1. Kriteria bangunan gedung
 - Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang
 - Ketidakesesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan.
2. Kriteria jalan lingkungan
 - Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman
 - Lebar jalan yang tidak memadai
 - Kelengkapan jalan yang tidak memadai
3. Kriteria penyediaan air minum
 - Ketersediaan akses air minum
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
 - Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan
4. Kriteria drainase lingkungan
 - Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan
 - Menimbulkan bau
 - Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
5. Kriteria pengelolaan air limbah
 - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah
 - Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku
 - Tercemarnya lingkungan sekitar

6. Kriteria pengelolaan persampahan
 - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan
 - Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah
7. Kriteria pengamanan kebakaran
 - Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif
 - Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai
 - Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran

Beberapa hal tersebut merupakan kriteria-kriteria yang mendukung bahwa sebuah wilayah dapat ditetapkan sebagai pemukiman kumuh atau tidak. Dari beberapa kriteria tersebut, permasalahan yang ingin diteliti diambil dari salah satu kriteria yakni kriteria bangunan gedung. Dalam kriteria bangunan gedung menurut UU No. 1 Tahun 2011 mengatakan bahwa suatu lingkungan dikatakan kumuh apabila memiliki ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang. Selain hal tersebut, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan juga menjadi indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian permukiman kumuh.

Bentuk bangunan yang tidak sesuai di Kelurahan Miroto disebabkan oleh banyak jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah tempat tinggal yang tersedia. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai sudut

pandang yakni ekonomi, sosial, budaya dan juga kesehatan. Dimana masyarakat di Kelurahan Miroto sudah menganggap hal tersebut biasa dan juga didukung dengan mata pencaharian yang rendah yang menyebabkan masyarakat tidak terlalu memikirkan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kriteria. Mutu hidup masyarakat di Kelurahan Miroto yang rendah sehingga semakin menambah kekumuhan pemukiman, kualitas serta kuantitas serta infrastruktur yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan. Dalam hal ini diperlukannya peningkatan sumber daya manusia dan mengoptimalkan peran pemerintah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi lebih baik lagi.

Dampak langsung dari adanya permukiman kumuh dalam hal keruangan yaitu adanya penurunan kualitas lingkungan fisik maupun sosial permukiman yang berakibat semakin rendahnya mutu lingkungan sebagai tempat tinggal (Yunus, 2000 dalam Gamal Rindarjono, 2010). Seperti halnya lingkungan permukiman kumuh yang ada di Semarang memperlihatkan bahwa kondisi lingkungan semakin menurun, secara umum dapat diamati berdasarkan hal berikut yakni fasilitas umum yang kondisinya tidak memadai, kualitas sanitasi yang rendah yang ditandai dengan tingginya wabah penyakit yang terjadi, dan sifat *extended family* (keluarga besar) pada sebagian besar permukiman kumuh mengakibatkan dampak pada pemanfaatan ruang yang tidak teratur, ditandai dengan banyaknya jumlah manusia yang berada pada sebuah bangunan sempit sehingga kondisi rumah terlihat acak-acakan dan tidak sehat.

Masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh cenderung memiliki persamaan latar belakang ekonomi, pendidikan yang rendah, keahlian dan kemampuan yang terbatas, serta kemampuan adaptasi lingkungan yang kurang memadai. Hal ini semakin mendukung lingkungan yang akan menjadi kumuh dan tidak layak huni. Karena masyarakatnya memiliki kesadaran dan juga keahlian yang kurang terampil sehingga akan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Kekumuhan permukiman dapat dilihat dari banyaknya rumah penduduk yang belum layak huni. Rumah penduduk yang belum layak huni dapat dilihat dari material yang digunakan salah satunya ialah kayu. Di Kecamatan Semarang, Kelurahan Miroto menduduki posisi ketujuh dari lima belas jumlah kelurahan di Semarang Tengah dengan jumlah rumah sebesar 1.260. Dari 1.260 jumlah rumah penduduk di Kelurahan Miroto 654 terdiri dari gedung, 485 rumah semi permanen dan 121 rumah yang terbuat dari kayu. Tingginya jumlah rumah penduduk di Kelurahan Miroto yang masuk dalam kategori semi permanen dan kayu memerlukan penanganan agar tidak termasuk ke dalam kategori kumuh.

Tabel 1.3
Banyaknya Rumah Penduduk Di Kecamatan Semarang Tengah
Tahun 2017

No.	Kelurahan	Gedung	Semi Permanen	Kayu	Jumlah
1.	Pekunden	1.185	24	157	1.366
2.	Karang Kidul	840	318	102	1.261
3.	Jagalan	911	354	118	1.383
4.	Brumbungan	577	410	236	1.223
5.	Miroto	654	485	121	1.260
6.	Gabahan	1.158	559	193	1.911
7.	Kranggan	1.358	256	29	1.643
8.	Purwodinatan	565	131	63	760
9.	Kauman	359	195	294	848
10.	Bangunharjo	470	174	190	834
11.	Kembang Sari	778	164	154	1.095
12.	Pandan Sari	758	31	59	858
13.	Sekayu	442	357	107	906
14.	Pindrikan Kidul	653	511	124	1.288
15.	Pindrikan Lor	476	690	204	1.370
Jumlah	2017	11.183	4.661	2.151	17.995
	2016	11.183	4.661	2.151	17.995
	2015	11.183	4.661	2.151	17.995
	2014	11.183	4.661	2.151	17.995
	2013	11.140	4.786	2.168	18.094

Sumber Data Monografi Kelurahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan penanganan melalui strategi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang memiliki beberapa pelaksanaan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut (Siagian 2004). Adapun strategi yang dilakukan

oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam menangani kriteria bangunan gedung dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA						CAPAIAN KINERJA (%)	
	TARGET		REALISASI		(**)%		2016	2017
	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
Presentase jumlah rumah layak huni	90,94%		97,12%		106,80%		96,80%	
Presentase luas lingkungan permukiman kumuh	0,70 %	0.50%	0,58%	0,29%	121,42%	172,41%	0,79%	0,58%

Sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2017-2018

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki target dan realisasi setiap tahunnya. Data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa presentase jumlah rumah layak huni telah berhasil mencapai target yakni sebesar 97,12% dan mengalami peningkatan dari tahun 2016 yakni sebesar 96,80%. Selain presentase jumlah rumah layak huni tabel diatas juga menunjukkan persentase luas lingkungan permukiman kumuh yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,58% dari 0,70%. Pada tahun 2017 data menunjukkan adanya peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang terhadap permukiman kumuh di Kota Semarang, peningkatan target persentase luas lingkungan permukiman kumuh juga

terjadi pada tahun 2018. Data 2018 menunjukkan bahwa persentase luas lingkungan permukiman kumuh berhasil mencapai target sebesar 0,29% dari 0,50%. Jadi jika dilihat dari data tersebut bahwa luas permukiman kumuh menurun dan persentase jumlah layak huni meningkat.

Namun pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Salah satu wilayah yang masuk dalam permukiman kumuh adalah Kelurahan Miroto yang berada di Kecamatan Semarang Tengah. Melalui observasi yang dilakukan peneliti saat turun lapangan masih banyak rumah warga yang belum layak huni dan belum memenuhi kriteria bangunan gedung sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Lurah Miroto yang mengatakan “bahwa di Kelurahan Miroto masih banyak rumah yang tidak layak huni dan perlu perbaikan terutama di RW 1,2 dan juga RW 4”. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di dalam satu rumah. Di Kelurahan Miroto sudah menjadi hal yang lumrah bahwa dalam 1 rumah terdiri dari beberapa kepala keluarga.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk sebanyak 5.245 jiwa dengan luas wilayah 0,35 km². Jika dihitung kepadatan penduduk di Kelurahan Miroto sebanyak 14,986 (rumus kepadatan penduduk = jumlah penduduk / luas wilayah). Suatu wilayah dapat dikatakan padat atau tidak jika memiliki perbandingan atau klasifikasi kepadatan penduduk. Sesuai dengan UU Nomor 56 Tahun 1960 kepadatan penduduk diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.5
Kategori Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)	Tingkat Kepadatan
0-50	Tidak Padat
51-250	Kurang Padat
251-400	Cukup Padat
>400	Sangat Padat

Sesuai dengan hasil yang didapat bahwa Kelurahan Miroto masuk kedalam kategori tidak padat yakni dengan hasil 14,986 (dapat dilihat dari hasil perhitungan sebelumnya). Namun melalui hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat di lokasi penelitian bahwa rumah-rumah yang ada di Kelurahan Miroto sempit, tidak memiliki jarak antara rumah satu dengan yang lain, dan juga kondisi rumah yang tidak baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa gambar yang diambil pada saat turun lapangan.

Gambar 1.1
Kondisi Rumah Warga di Kelurahan Miroto



Sumber dokumentasi pribadi

Gambar diatas merupakan sebagian gambaran kondisi rumah yang ada di Kelurahan Miroto yang diambil oleh peneliti. Dari hasil observasi yang dilakukan masih banyak rumah yang tidak layak huni, ukuran rumah tidak sesuai, tidak adanya jarak antar rumah yang disebabkan padatnya bangunan yang ada di Kelurahan Miroto. Jumlah penduduk dengan jumlah rumah yang ada di Kelurahan Miroto tidak dapat memenuhi kebutuhan warganya. Banyaknya penduduk yang tinggal didalam satu disebabkan oleh beberapa faktor yakni ekonomi dan kebiasaan. Dimana faktor ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kelurahan Miroto yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai buruh dan pemulung. Selain faktor ekonomi, jumlah kepala keluarga yang lebih dari 1 tinggal di 1 rumah sudah menjadi kebiasaan bagi warganya karena kebanyakan rumah yang ada disana merupakan warisan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut.

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk, wilayah perumahan dan permukiman juga akan semakin padat. Kepadatan penduduk yang terjadi diakibatkan tingginya urbanisasi dan dampak lainnya adalah semakin luasnya permukiman kumuh di Semarang. Salah satu kelurahan yang tergolong kedalam permukiman kumuh ialah Kelurahan Miroto yang ada di Kecamatan Semarang.

Berdasarkan kriteria-kriteria permukiman kumuh yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh kelurahan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan strategi yang

sudah dijelaskan diatas. Namun, jika dilihat kondisinya melalui observasi yang sudah dilakukan, masalah yang ada di Kelurahan Miroto masih belum dapat diatasi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk lebih memahami tentang bagaimana cara untuk mengatasi permukiman kumuh. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul tentang **“Pelaksanaan Strategi Penanganan Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah”** agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka penetapan strategi yang tepat dalam perencanaan sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan permukiman yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto?
2. Apa faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah dalam melakukan pelaksanaan strategi untuk mengatasi masalah penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan mendeskripsikan pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto
2. Untuk menganalisis faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah dalam pelaksanaan strategi untuk mengatasi masalah penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan terhadap pengembangan teori-teori ilmu sosial dan politik secara umum dan pengembangan pada bidang manajemen strategi khususnya terkait dengan strategi perencanaan dan pemberdayaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

a. Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan strategi dalam penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Semarang.

b. Pemerintah Kota Semarang

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan upaya penanganan penataan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.

c. Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.

d. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran masyarakat dalam penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh dengan mendayagunakan masyarakat.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu (*State of The Art*)

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk menjadi gambaran bagaimana penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai pembanding kenyataan dilapangan dengan teori-teori yang akan digunakan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk penelitian ini yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bani Putro Yulianti, M. Baiquni, Su Ritohardoyo, Hadi Sabari Yunus dan Bakti Setiawan (tahun 2015) dengan judul penelitian “Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung di Kota Yogyakarta)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa kondisi prasarana lingkungan serta menganalisa keberhasilan program penataan kawasan Tegalpanggung menurut persepsi masyarakat setempat. Dari aspek sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa lingkungan kumuh yang terjadi akibat kebiasaan penduduk membuang sampah sembarangan, air kotor dan air jamban disungai yang menjadikan sungai tercemar. Selain sarana prasarana, hal lain yang menjadi penyebab tingginya tingkat kepadatan penduduk di Tegalpanggung adalah banyaknya penduduk pendatang yang datang dan bermukim karena alasan letak lokasi kerja dan keberadaan keluarga yang sudah tinggal di lokasi. Dimana hal ini menyebabkan rumah tumbuh padat dan tidak teratur. Kondisi sosial juga mempengaruhi terjadi permukiman kumuh di Tegalpanggung dimana masyarakat memiliki perekonomian yang rendah, menyebabkan rendahnya motivasi untuk memiliki rumah yang layak dan sehat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melakukan penataan dan peremajaan kembali prasarana lingkungan yang berada di bantaran Sungai Code termasuk di permukiman kumuh Tegalpanggung. Menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan juga kuantitatif dengan menggunakan metode survey (kuesioner) kepada 40 responden yang diambil secara acak (*random sampling*). Dari

penelitian ini menunjukkan hasil kepuasan masyarakat terhadap program penataan dan peremajaan lingkungan di Tegalpanggung sebesar 56% yang berarti masyarakat puas dengan program yang dijalankan.

Program penataan dan peremajaan prasarana lingkungan di kawasan Tegalpanggung adalah pembuatan rusunawa masyarakat yang dirasa kurang puas dengan persentase 45% karena sepenuhnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat, peremajaan terhadap saluran drainase dan SPAH dengan respon masyarakat yang cukup puas, pembuatan saluran sanitasi dan penataan WC, ruang terbuka hijau sebanyak 62,5% dan pelebaran jalan dan pavingisasi di ruas jalan kampung permukiman mendapat respon cukup puas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amos Setiadi (2014) dengan judul penelitian “Tipologi dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Bontang”. Penelitian ini menjadi landasan dalam menetapkan tipologi kawasan permukiman kumuh di kota Bontang agar dapat ditemukan pola penanganan yang relevan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kota Bontang. Tipologi permukiman kumuh di kota Bontang dibagi menjadi 3 yaitu kumuh tinggi, kumuh sedang dan kumuh rendah.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria. Menurut Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum (2006)

ada 6 kriteria yakni vitalitas non ekonomi, vitalitas ekonomi kawasan, status kepemilikan tanah, keadaan sarana prasarana, komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dan prioritas penanganan. Setiap kriteria tersebut memiliki bobot tersendiri dalam penilaiannya yang bersifat relative dan bergantung pada prefensi individu atau kelompok masyarakat..

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa pola penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan yakni perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan rehabilitasi yang bersifat tidak mendasar dan tidak menyeluruh agar menjadi hunian yang layak huni yang dilakukan pada permukiman yang memiliki tingkat kumuh sedang, peremajaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan perombakan dan perubahan yang mendasar diperuntukkan untuk kawasan permukiman kumuh tinggi, permukiman kembali (*resettlement*) yaitu dengan menempatkan permukiman pada lokasi yang berbeda yang sudah disediakan dengan tingkat kumuh tinggi, *land sharing* yang dapat dilakukan dengan penataan ulang diatas tanah/lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat yang cukup tinggi, masyarakat akan memiliki kembali lahannya dengan luas yang sama, *land consolidation* yang dilakukan dengan penataan ulang diatas tanah yang sudah dihuni namun kepemilikan tanah tidak sah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ade Masya Resa, Zulfan Saam, dan Suardi Tarumon dengan judul penelitian “Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru”. Metode penelitian yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pengamatan lapangan, wawancara, dan diskusi kepada para *stakeholders*. Metode strategi penataan yang digunakan adalah AHP (Saaty, 2000) yang bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penataan kawasan permukiman kumuh kampung Bandar berdasarkan kriteria-kriteria yang ada.

Berdasarkan hasil analisis kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh Kampung Bandar dapat dianalisa faktor penyebab kekumuhan antara lain belum adanya rencana tat ruang sebagai legalitas acuan pembangunan, rendahnya daya beli masyarakat, layanan infrastruktur permukiman belum memadai, belum optimalnya penegakan aturan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan strategi penataan permukiman kumuh antara lain dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan masyarakat. Sementara untuk meningkatkan kualitas dilakukan dengan menggunakan strategi pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

Keempat, penelitian dengan judul “Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi” yang dilakukan oleh May Istikasari dan juga Parfi Khadiyanto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan lokasi yang masuk kedalam kategori permukiman kumuh. Direktorat Pengembangan Permukiman mengatakan bahwa kekumuhan suatu wilayah dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan, aksesibilitas, kependudukan, status tanah, dan kondisi prasarana lingkungan. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan perhitungan pembobotan berdasarkan hasil kuisioner dan observasi yang di dapat di lapangan.

Untuk dapat melakukan identifikasi permukiman kumuh di pusat kota Jambi serta untuk mengarahkan pada pemecah permasalahan dan pencapaian tujuan studi, maka diperlukan adanya pendekatan studi. Adapun jenis metode pendekatan yang dilakukan adalah teknik analisis kuantitatif, teknik analisis deskriptif dan teknik analisis visual. Kekumuhan yang terjadi disebabkan masalah persampahan, genangan drainase, pelayanan air minum, jumlah bangun temporer, jarak antar bangunan yang rapat, dan dominasi status tanah atau kepemilikan tanah.

Kelima, penelitian yang berjudul “Strategi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kawasan Kaligawe, Semarang)” yang ditulis oleh Agustina Rahmawati. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa penanganan permukiman kumuh yang dilakukan di kota Semarang belum optimal, hal ini dapat dilihat dari berbagai kendala yang dihadapi seperti minimnya anggaran serta masyarakat yang memiliki pola pikir *money orientation* ketika diberikan bantuan. Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi masalah besar yang harus ditangani oleh pemerintah walaupun program kegiatan yang dilakukan dan dana yang dikeluarkan karena untuk mengatasi permasalahan ini harus ada sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah.

Sebelum menjalankan program dan kegiatan apa yang akan dijalankan maka sebelumnya dilakukan perumusan strategi. Dalam perumusan strategi akan dianalisis

lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang ada pada organisasi. Dengan adanya analisis ini maka diharapkan dapat mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dari penanganan permukiman kumuh.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *public administration* yang sering juga diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Dalam kamus Webster (1966), *public administration* diartikan sebagai : “*branch of political science dealing primarily with the structure and workings of agencies charged with the administration of government function*”, beberapa pengertian administrasi publik (*public administration*) dapat dikemukakan pendapat para pakar sebagai berikut :

1. R.C Chandler dan J.C Plano (1988) dalam “*Public Administration Dictionary*” administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
2. H.E McCurdy (1986) dalam “*Public Administration*” ; *a bibliographical guide to the literature*” menyebut administrasi sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara.

3. Dimock, Dimock & Fox : administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen.
4. Starling : Administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah, yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan.
5. David H. Rossenbloom (1988) : Administrasi Publik, yaitu : “ *is the use of managerial, legal and political*” merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.
6. Nicholas Henry : Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah teori yang menjalankan fungsi manajemen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjelaskan peran pemerintah dalam memberikan arahan dan memimpin

masyarakat agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

1.5.3.1 *Old Public Administration (OPA)*

Woodrow Wilson dalam Thoha (2008:72-73) mengemukakan konsep pemerintahan dalam konsep *Old Public Administration* (yang dikenal dengan OPA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan netral, professional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Ada setidaknya dua tema kunci memahami OPA yang telah diletakkan oleh Wilson. Pertama, ada perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan manajernya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif dan efisien.

Adapun konsep *Old Public Administration* adalah sebagai berikut (Thoha 2008: 72-73) :

- Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang
- *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik

- Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik
- Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggungjawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya
- Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis
- Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi
- Nilai-nilai utama (the primary values) dari administrasi publik adalah efisiensi dan nasionalitas
- Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya amat terbatas
- Peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas

1.5.3.2 *New Public Management* (NPM)

Organisasi sektor publik sering divisualisasikan sebagai organisasi yang kaku, tidak inovatif, minim kualitas, dan beberapa kritikan lainnya hingga memunculkan sebuah gerakan reformasi di sektor publik yaitu dengan adanya konsep *New Public Management* (NPM). Ditinjau dari perspektif historis, istilah *New Public Management* pada awalnya dikenalkan di Eropa tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional (Mahmudi,

2010:33-34). Konsep OPA perlahan tergantikan dengan konsep NPM yang mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik dapat menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki kualitas lebih baik atau minimal sama dengan yang dihasilkan sektor swasta.

Diungkapkan oleh Islamy (2003:55-56) bahwa paradigma manajemen publik mengkritisi nilai-nilai administrasi publik yang dianggap fundamental dengan menegaskan beberapa hal, yaitu :

- Birokrasi bukanlah satu-satunya penyedia (*provider*) atas barang dan jasa publik karena sesuai dengan prinsip *generic management* yang fleksibel, sektor swasta telah lama menjadi pioneer dalam menyediakan juga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
- Sistem manajemen swasta yang fleksibel itu bisa diterapkan atau diadopsi oleh sektor publik
- Peran ganda sektor publik di bidang politik dan administrasi yang telah lama terjadi bisa lebih terwujud di dalam paradigma baru, manajemen publik
- Akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara lebih nyata

1.5.3.3 *New Public Service* (NPS)

Periode ketiga dalam perkembangan manajemen publik, yaitu periode *New Public Service* atau NPS. Berbeda dengan konsep model klasik dan NPM, konsep NPS adalah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun demikian NPS

mempunyai normativ model yang dapat dibedakan dengan konsep-konsep lainnya. Thoha (2008:84) menyatakan bahwa ide dasar dari NPS dibangun dari konsep-konsep : 1) *teori democratic citizenship*, 2) model komunitas dan *civil society*, 3) organisasi *humanism*, 4) *postmodern* ilmu administrasi publik. Pemahaman mengenai manajemen dalam sektor publik merupakan adopsi dari unsur-unsur manajemen pada sektor swasta. Oleh karena itu, senada diungkapkan oleh Mahmudi (2010:36) organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip sektor swasta.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

Overman (1984:1) menjelaskan bahwa “*public management is an interdisciplinary study of generic aspects of organization. It is a blend of the planning, organizing, and controlling function management of human, financial, physical, information and political resources*”, secara mendasar dapat diartikan, manajemen publik merupakan penelitian interdisipliner aspek generik organisasi.

Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik dan sumberdaya politik.

Manajemen publik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengemudikan, mengarahkan dan memimpin seseorang untuk melakukan tanggungjawabnya dan berfokus untuk melayani masyarakat.

1.5.5 Pelaksanaan Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan adalah tindakan untuk sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dimana biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap. Majone dan Wildavsky mengatakan bahwa pelaksanaan adalah suatu evaluasi sedangkan Browne dan Wildavsky mengatakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa pelaksanaan akan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan mekanisme ataupun sistem. Pelaksanaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, tempat pelaksanaan dimana dan bagaimana cara yang harus dilakukan. Proses rangkaian yang selanjutnya dilakukan yang dengan pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional menjadi kenyataan guna

mencapai sasaran dari kegiatan ataupun program yang akan dilaksanakan.

Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. Adapun faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan program ataupun kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi, merupakan hal yang dapat mendukung pelaksanaan program. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resources* (sumberdaya), meliputi beberapa komponen yakni terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi dalam pengambilan keputusan guna melaksanakan tugas dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, merupakan sikap dan komitmen yang dimiliki pada pelaksanaan program khususnya yang menjadi implementer program
- d. Struktur birokrasi, yakni terkait dengan SOP (*Standart Operating Procedure*) yang mengatur alur pelaksanaan program.

1.5.6 Manajemen Strategi

Nawawi (2013:149) mengatakan bahwa manajemen strategik adalah sebuah perencanaan yang memiliki skala besar (perencanaan strategic) dengan jangkauan

tujuan ke masa yang akan datang (visi), dimana setiap keputusannya ditetapkan oleh manajemen tertinggi yang mengakibatkan keputusan bersifat mutlak dan mendasar. Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan sebuah organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien (misi) dalam menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional dalam menghasilkan barang, jasa dan pelayanan) yang memiliki kualitas yang baik dengan mengoptimalkan capaian strategic (tujuan operasional) dengan berbagai sasaran organisasi (tujuan operasional).

Fred R. David mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen strategi sebagai sebuah ilmu dan seni untuk merumuskan, menjalankan serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi lebih baik dalam mencapai tujuannya.

Bambang Hariadi (2003) mengatakan bahwa manajemen strategi merupakan sebuah tahapan yang disusun secara berurut mulai dari perumusan strategi, implementasi strategi dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang sudah dijalankan. Hal ini dilakukan untuk mendukung visi dan misi sebuah organisasi agar dapat berjalan dengan baik.

Manajemen strategi merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang sebuah perencanaan agar dapat mencapai visi, misi serta tujuan organisasi dengan menyusun beberapa cara mulai dari perumusan strategi hingga evaluasi strategi. Dari pengertian manajemen strategi di atas yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa manajemen

strategik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) kearah yang sama pula. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan strategi utama organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dengan unsur-unsurnya sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.

Dalam hal ini Nawawi (2013) menyimpulkan manajemen strategi ke dalam beberapa karakteristik yakni :

- a. Manajemen strategi disusun untuk sebuah perencanaan yang bersifat besar dalam sebuah organisasi yang dituliskan dalam sebuah Rencana Strategi (Renstra) dan dijabarkan dalam Perencanaan Operasional (Renop) dan kemudian dibagi ke setiap program kerja
- b. Rencana Strategi (Renstra) di bidang non profit (pemerintahan) memiliki jangka waktu 25-30 tahun sebagai rencana jangka panjang, untuk Rencana Operasional (Renop) digunakan untuk 5 tahun yang disebut juga Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) sebagai rencana jangka menengah, serta rencana jangka pendek dijalankan dalam APBN yang menjadi rencana dan program tahunan

- c. Visi, misi, tujuan sebuah organisasi menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis
- d. Rencana strategis berisi program-program yang memiliki sasaran jangka menengah
- e. Manajemen puncak memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan Renstra dan Renop untuk mempertahankan dan mengembangkan jangka menengah dan jangka panjang
- f. Dalam implementasi Renstra dan Renop harus melakukan fungsi-fungsi manajemen seperti pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, kontrol dan evaluasi

Dengan adanya manajemen strategi diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan kekomplekan penyusunan perencanaan sebagai fungsi manajemen, dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan semua sumber daya yang ada secara nyata dan menghasilkan tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Selain itu, manajemen strategi juga bertujuan untuk :

- Memberikan arah dalam mencapai tujuan organisasi agar arah kegiatan jelas untuk mengendalikan dan mengevaluasi keberhasilan tujuan
- Menjaga kepentingan berbagai pihak, karena banyaknya pihak yang terlibat dapat menjadi tolak ukur berhasil tidaknya kebijakan yang dibuat sesuai dengan perannya
- Mengantisipasi setiap perubahan secara merata, dengan adanya manajemen strategi diharapkan dengan adanya perubahan yang terjadi secara mendadak maka dapat

mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman untuk melakukan pengendalian

- Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi terhadap sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki

1.5.6.1 Proses dan Tahapan Manajemen Strategi

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam proses menyusun manajemen strategis, yakni :

1. Merumuskan strategi, dalam tahap ini organisasi akan melakukan penyusunan dan pengembangan visi, misi, analisis SWOT, menentukan dan menetapkan tujuan jangka panjang organisasi dan menyusun beberapa cara-cara lain untuk mengatasi permasalahan.
2. Menerapkan strategi, pada tahap ini strategi yang sudah disusun dan dijalankan kemudian diimplementasikan organisasi seperti membentuk struktur organisasi, membuat kebijakan, pengelolaan sumberdaya dan lain sebagainya.
3. Mengevaluasi strategi dilakukan karena lingkungan yang selalu mengalami perubahan sehingga evaluasi secara bertahap harus dilakukan. Evaluasi juga dilakukan untuk melihat faktor-faktor internal maupun eksternal masih berkaitan dan cocok atau tidak untuk diterapkan.

1.5.6.2 Analisis Lingkungan Strategis

Lingkungan organisasi dipengaruhi oleh dua dimensi yakni dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal merupakan gambaran organisasi saat ini yang di

dalamnya terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dalam setiap perumusannya dilakukan dengan seksama dan rinci untuk menyusun Renstra. Dimensi lingkungan eksternal merupakan analisis terhadap lingkungan sekitar organisasi yang terdiri dari berbagai aspek yakni kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kependudukan, kemajuan dan perkembangan ilmu teknologi, adat istiadat, agama dan banyak hal lainnya.

Agar manajemen strategi dapat dijalankan maka untuk mengatasi permasalahan internal dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada pada organisasi, sedangkan untuk mengurangi permasalahan eksternal menghindari hambatan dan tantangan.

1.5.6.3 Analisis SWOT

Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu alat analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Menurut Fredy Rangkuti, Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan startegis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategis dan kebijakan perusahaan.

Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui apa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka hal tersebut berguna untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti baik dari lingkungan internal maupun eksternal yang hasilnya dapat diperoleh dengan waktu yang relatif singkat. Analisis SWOT dapat digunakan dengan lebih mudah dengan adanya bantuan matrik SWOT. Matrik SWOT akan membantu dalam merumuskan berbagai strategi yang sudah disusun dan diharapkan dengan adanya matrik ini maka akan mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki serta dapat mengatasi ancaman dalam organisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga dari matrik SWOT tersebut akan memperoleh empat kelompok alternative strategi yang disebut dengan strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT.

1.5.7 Penanganan dan Penataan

Penanganan merupakan sebuah proses, cara, ataupun perbuatan untuk menangani sesuatu. Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Badudu, Zein, 1995:132). Penataan membutuhkan waktu dan proses yang panjang, dimana sebelum melakukan penataan dilakukan perumusan dan perencanaan pelaksanaan yang lebih teratur dalam mencapai tujuannya. Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan

ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Kamus Tata Ruang, Edisi I: 1997).

Dalam UU RI No. 24 tentang penataan ruang dikatakan bahwa penataan ruang adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sujarto dalam bukunya *Pengantar Planologi* mengemukakan bahwa penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan. (Sujarto, 2003:50).

1.5.8 Perumahan dan Permukiman Kumuh

1.5.8.1 Perumahan

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU No. 1 Tahun 2011). Perumahan juga dikenal dengan istilah *housing*. *Housing* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Perumahan tidak sama dengan permukiman. Permukiman merupakan lingkungan tempat tinggal manusia sekaligus berfungsi sebagai pendukung perikehidupan dan penghidupan para penghuninya. Perumahan lebih tepat didefinisikan sebagai sekelompok atau sekumpulan rumah. Dalam SNI 03-6981-2004 perumahan didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

1.5.8.2 Permukiman

Secara ilmu bahasa, kata permukiman tergolong ke dalam kata benda. Dalam bahasa Inggris, permukiman dikenal sebagai *human settlement* yaitu sekumpulan manusia baik di kota maupun desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Beberapa konsep yang menyangkut permukiman, menurut Finch (1957) (dalam Nugroho 2010), *settlement* atau permukiman adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau kediaman manusia yang mencakup fasilitas seperti bangunan rumah, jalur jalan dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia tersebut.

Dari batasan tersebut jelas bahwa permukiman bukan hanya kelompok bangunan tempat tinggal tetapi juga didalamnya termasuk semua prasarana dan sarana penunjang kehidupan penghuninya. Hudson (1970) menjelaskan istilah *settlement* dalam dua arti yang berbeda walau saling berkaitan, yakni permukiman

yang mengacu pada arti kolonisasi pada daerah baru dengan proses migrasi penduduk didalamnya dan permukiman yang mengacu pada arti kelompok-kelompok bangunan rumah tempat tinggal manusia.

Menurut Barlow dan Newton (1971) (dalam Nugroho 2010), istilah permukiman atau *settlement* adalah semua tipe tempat tinggal manusia baik satu gubuk atau pondok tunggal beratapkan dedaunan, atau rumah-rumah di perladangan hingga permukiman yang sangat besar/kota dengan ribuan tempat tinggal.

1.5.8.3 Perbedaan Perumahan dan Permukiman

Terdapat perbedaan pengertian antara permukiman dengan perumahan. Permukiman berasal dari kata pemukim. Perbedaan yang nyata antara perumahan dan permukiman terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuninya. Lingkungan perumahan hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah.

1.5.8.4 Permukiman Kumuh

Herbet J. Gans (1968) mengartikan permukiman kumuh dengan kalimat "*obsolescences per se not harmful addesignatioan of an area as a slum for the reason alone is merely a reflection of middle class standards an middle a lass income*", yang dapat diartikan permukiman kumuh sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Drakakakis-Smith (1980) dan Grimes (1976) mengartikan permukiman kumuh adalah kompleks

permukiman yang secara fisik daerah kumuh, ditandai oleh bentuk rumah yang kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola *settlement* yang tidak beraturan, kualitas lingkungan yang rendah serta minimnya fasilitas umum.

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara itu, dalam UU tersebut diberikan pengertian kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dengan demikian, kawasan kumuh mengidentifikasi kawasan yang padat, tidak terawat, kotor, tidak teratur dan berkekurangan.

Judohusodo (1991) mendefenisikan permukiman kumuh dari fenomena kependudukan, yakni permukiman kumuh merupakan permukiman yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup seperti tingginya angka kepadatan penduduk yaitu berkisar 350-1.250 jiwa per hektar dengan ukuran luas kampung 15-20 hektare, sedangkan Muta'ali (2006), berdasarkan hasil observasi lapangan menyebutkan bahwa ciri-ciri kawasan permukiman kumuh yang menonjol dan perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Rumah beratapkan jerami
- Rumah tanpa jendela/ventilasi udara, dan sinar matahari tidak dapat masuk
- Tidak terdapat pembagian ruang/kamar sesuai dengan peruntukannya
- Dinding dan lantai lapuk
- Banyak dihuni oleh anggota rumah tangga tidak produktif

- Kepala rumah tangga bekerja pada jenis pekerjaan berpenghasilan rendah
- Tidak memiliki jamban
- Berada pada lingkungan permukiman dengan sanitasi jelek

1.6 Operasionalisasi Konsep

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pada penelitian ini akan dikaji beberapa fenomena yang mencerminkan tindakan, aktivitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan sebagai upaya atau proses untuk mencapai strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditentukan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2016-2021

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disebutkan yakni tentang pelaksanaan strategi yang dilakukan untuk menangani masalah permukiman kumuh dan faktor penghambat, fenomena penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto

Dalam penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman di Kelurahan Miroto terdapat beberapa strategi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu peningkatan kualitas lingkungan permukiman

dan jumlah rumah layak huni melalui program Rumah Tidak Layak Huni melalui tahapan perumusan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi.

2. Analisis lingkungan strategis terdiri dari kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal.

a. Analisis lingkungan internal adalah lingkungan dalam organisasi. Berbagai kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki organisasi :

- Kesesuaian visi, misi, dan tujuan dalam penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto
- Sumber daya yang ada seperti manusia, alam, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

b. Analisis lingkungan eksternal adalah lingkungan diluar nilai-nilai strategis organisasi yakni faktor sosial budaya, faktor ekonomi, partisipasi masyarakat serta keterlibatan *stakeholders*.

3. Identifikasi analisis SWOT yang terdiri dari kondisi lingkungan internal (dalam) dan kondisi lingkungan eksternal (luar) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto.

4. Identifikasi faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah dalam pelaksanaan strategi untuk mengatasi masalah penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses atau cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui kebenaran suatu hal. Penelitian dibagi menjadi dua jenis, yakni penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dan objek yang ada pada lingkungan sekitar lokasi penelitian yakni masyarakat di Kelurahan Miroto, melakukan interaksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan dugaan-dugaan mereka tentang lingkungan sekitarnya (Nasution, 1988:5).

Penelitian sosial dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian deskriptif dan penelitian eksplanasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan mengetahui lebih dalam lagi mengenai kondisi dan kenyataan sosial yang dialami masyarakat Kelurahan Miroto, dengan cara menceritakan atau mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti yakni tentang perumahan dan permukiman kumuh.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pemuda No. 143, Sekayu, Kecamatan Semarang

Tengah, Kota Semarang selaku instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap masalah kekumuhan permukiman yang ada di Kota Semarang. Selain melakukan penelitian di instansi pemerintah, peneliti juga akan melakukan penelitian di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau sering juga disebut responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive* yang artinya pengambilan data secara sengaja untuk memperoleh informasi dari orang-orang yang mengetahui dengan benar dan pasti mengenai masalah yang terkait dengan kekumuhan yang ada di Kelurahan Miroto. Agar data yang diperoleh benar dan sah maka peneliti mengadakan *tringulasi* data dengan melakukan pengecekan objek yang diteliti kepada subjek yang berbeda dengan laporan atau dokumen yang relevan (Moloeng, 2007:287).

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya yang terdiri dari Seksi Pendataan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya serta Pejabat dan masyarakat Kelurahan Miroto

1.7.4 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (2009:157) mengatakan bahwa sumber data yang diambil dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, dokumen, dan data tambahan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut jenis data dibagi menjadi kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan lain sebagainya. Data-data yang menggambarkan dan merepresentasikan masalah penanganan perumahan dan permukiman di Kelurahan Miroto dapat ditemui melalui UU No. 1 Tahun 2011, Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Surat Keputusan Penetapan Lingkungan Kumuh oleh Walikota Semarang, peraturan perundang-undangan, buku, berita dan informasi dari koran maupun internet, hasil studi, skripsi dan juga jurnal.

1.7.5 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus memiliki sumber data yang konkrit agar data-data dan informasi yang diberikan benar adanya dan sah. Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber utama dalam penelitian terkhususnya penelitian kualitatif bersumber dari kata-kata dan juga tindakan, selebihnya diambil dari data tambahan yang dimiliki oleh peneliti seperti dokumen ataupun foto. Berkaitan dengan hal ini sumber data dibagi kedalam data tertulis, foto dan juga statistik. Sumber data terdiri atas dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diambil ataupun diperoleh secara langsung dari sumber penelitian (subjek penelitian). Sumber penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan juga masyarakat yang berada disekitar lingkungan Kelurahan Miroto. Data primer yang diperoleh melalui hasil pengamatan langsung ke lapangan tentang situasi dan kondisi seperti contohnya dengan melakukan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau diambil melalui bahan yang ada dipustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yakni permasalahan permukiman kumuh yang berada di Kelurahan Miroto. Biasanya bentuk data sekunder berupa catatan-catatan yang diperoleh pada saat terjun kelapangan, dokumen, jurnal, berita dan informasi dari internet.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara maupun langkah yang dapat digunakan dalam penelitian dengan cara menghimpun, mengambil ataupun menjanging data untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan data, ada beberapa cara yang dilakukan yakni :

a. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg (2002) adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan data dengan melalui tanya jawab sehingga dapat ditemui makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai alat untuk melakukan pengumpulan data. Adapun tujuan diadakannya wawancara seperti yang dikatakan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) adalah untuk mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian yang akan terjadi dimasa mendatang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan (tringulasi). Wawancara dilakukan dilakukan dengan beberapa informan yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan juga masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Miroto. Informan tersebut dipilih karena pada dasarnya organisasi yang menangani masalah permukiman kumuh adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan tentunya warga sekitar yang berada pada lokus penelitian yang secara langsung mengetahui dan mengalami permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi

Selain wawancara, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah dengan cara observasi ataupun pengamatan. Hadi (1987:136) menerangkan bahwa observasi merupakan pengamatan dan pencacatan secara sistematis dan tersusun

terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini merupakan salah satu metode yang sangat penting dilakukan dsalam penelitian kualitatif karena metode merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Berhasil tidaknya sebuah penelitian dapat dilihat dari pengamatan yang dilakukan. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan secara sistematis kegiatan dan interaksi antar subjek (Burns, 1990:80).

Dikatakan bahwa observasi penting karena peneliti dapat mengumpulkan data secara visual sehingga data tersebut valid. Observasi sebagai teknik pengambilan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan angket. Bila wawancara dan angket melakukan penelitian dengan berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang namun juga objek-objek alam dan lingkungan sosial sekitar. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permukiman kumuh yakni di Kelurahan Miroto. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dilihat dari sarana prasarana, lingkungan sosial dan juga perekonomian masyarakatnya.

c. Dokumentasi

Metode selanjutnya dapat menggunakan dokumentasi. Metode ini merupakan sebuah cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah dan persoalan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap, sah dan tidak mengada-ada melalui data yang sudah ada sebelumnya seperti indeks, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk

dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Kelurahan Miroto. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Namun, dokumentasi juga memiliki kelemahan-kelemahan yakni bila ada kekurangan data sulit untuk melengkapinya karena suatu peristiwa tidak akan terulang lagi dalam keadaan dan peristiwa yang sama.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan dari beberapa teknik analisis data yakni teknis analisis domain, teknik analisis taksonomik dan teknik analisis komponensial. Dimana dalam teknik analisis domain terdapat hubungan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ditemukan peneliti. Spradley mengatakan bahwa ada 9 hubungan semantik dalam analisis domain yakni jenis, ruang, sebab akibat, alasan, lokasi kegiatan, cara untuk mencapai tujuan, fungsi, urutan tahapan, serta atribut. Hubungan teknik analisis domain dengan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sebab akibat, alasan, lokasi kegiatan dan urutan tahapan strategi yang dilakukan dalam penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto.

Selain teknik analisis domain, peneliti juga menggunakan teknik analisis taksonomik yang menjelaskan bahwa dari strategi yang sudah dipaparkan terdapat

domain dan sub domain yang akan diteliti pada saat peneliti ke lapangan. Adapun strategi-strategi yang akan dilakukan adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan jumlah rumah layak huni dengan melakukan program lingkungan sehat dan program yang terdiri dari peningkatan dan penanganan sarana prasarana lingkungan permukiman, optimalisasi pengelolaan sarana prasarana lingkungan permukiman dan rumah tidak layak huni. Sedangkan teknik analisis komponensial baru akan dilakukan jika kegiatan wawancara dan observasi sudah dilakukan.

1.7.8 Kualitas Data

Kualitas data diperlukan agar data yang diperoleh peneliti sah dan sesuai dengan fakta. Cara yang digunakan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan adalah melalui triangulasi yakni dengan melakukan pengecekan data yang dilakukan dari berbagai sumber data yakni melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Triangulasi data dibagi menjadi 3 jenis yakni triangulasi sumber data (mengecek data melalui beberapa sumber yang sudah disebutkan yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan juga masyarakat di Kelurahan Miroto), triangulasi teknik (menguji validitas dan reliabilitas data dengan cara melakukan pengecekan kepada sumber yang sama namun dengan cara yang berbeda), dan triangulasi waktu (waktu sering mempengaruhi kredibilitas data, oleh sebab itu dapat dilakukan pengujian data pada waktu yang berbeda dan cara yang berbeda juga).